

Aceh TRC

DAMAI ACEH

Sebuah **Kotak Pandora**

Rangkuman Isi Laporan Temuan KKR Aceh:
Peulara Damee, Merawat Perdamaian

AJAR

KontraS Aceh
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Aceh
The Aceh Commission for Disappearances and Victims of Violence

Kontras Aceh × Asia Justice and Rights


Aceh TRC
DAMAI
Sebuah
Kotak
Pandora
ACEH

↘ Kontributor

Amalia Suri
Azharul Husna
Fuadi Mardhatillah
Maulana
Rozhatul Valica

↘ Ilustrasi

Cut Aya Sofia
Idrus Bin Harun
Iswadi Basri
Mahathir
Munzir Baharuddin
Tauris Mustafa

↘ Data

KKR Aceh

↘ Desain Cover & Layout

Allyca Putri Anjani

Copyleft, 2024

Tanpa hak cipta. Diperbolehkan memperbanyak sebagian atau seluruh ini buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Dengan tujuan untuk tidak diperjualbelikan.

Daftar Isi

↘ 01 Daftar Isi

↘ 02 Kata Pengantar

↘ 06 Pembukaan

↘ 14 Latar Sejarah

↘ 22 Kategori Kekerasan

↘ 28 Kekerasan Berbasis Gender

↘ 34 Efek & Dampak

↘ 40 Mandat & Rekomendasi

↘ 50 Harapan Generasi Muda

Kata Pengantar

Orang Muda & Estafet Pengetahuan Perdamaian

" Mereka yang tidak dapat mengingat masa lalu, dikutuk untuk mengulanginya. "

(George Santayana, The Life of Reason, 1905: Great Ideas of Western Man).

Dalam rapid assessment oleh KontraS Aceh, orang muda di Aceh semakin menjauh dari kisah-kisah pelanggaran HAM masa lalu. Ironisnya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mengungkapkan 5.264 pernyataan korban dalam pengungkapan kebenaran, meskipun belum semuanya terdokumentasi.

Setelah kesepakatan perdamaian GAM-RI 2005, Aceh memiliki legasi penting dalam moral global. Diperlukan orang muda sebagai pewaris perdamaian dan pembelajaran sejarah, pentingnya pendidikan HAM semakin menonjol.

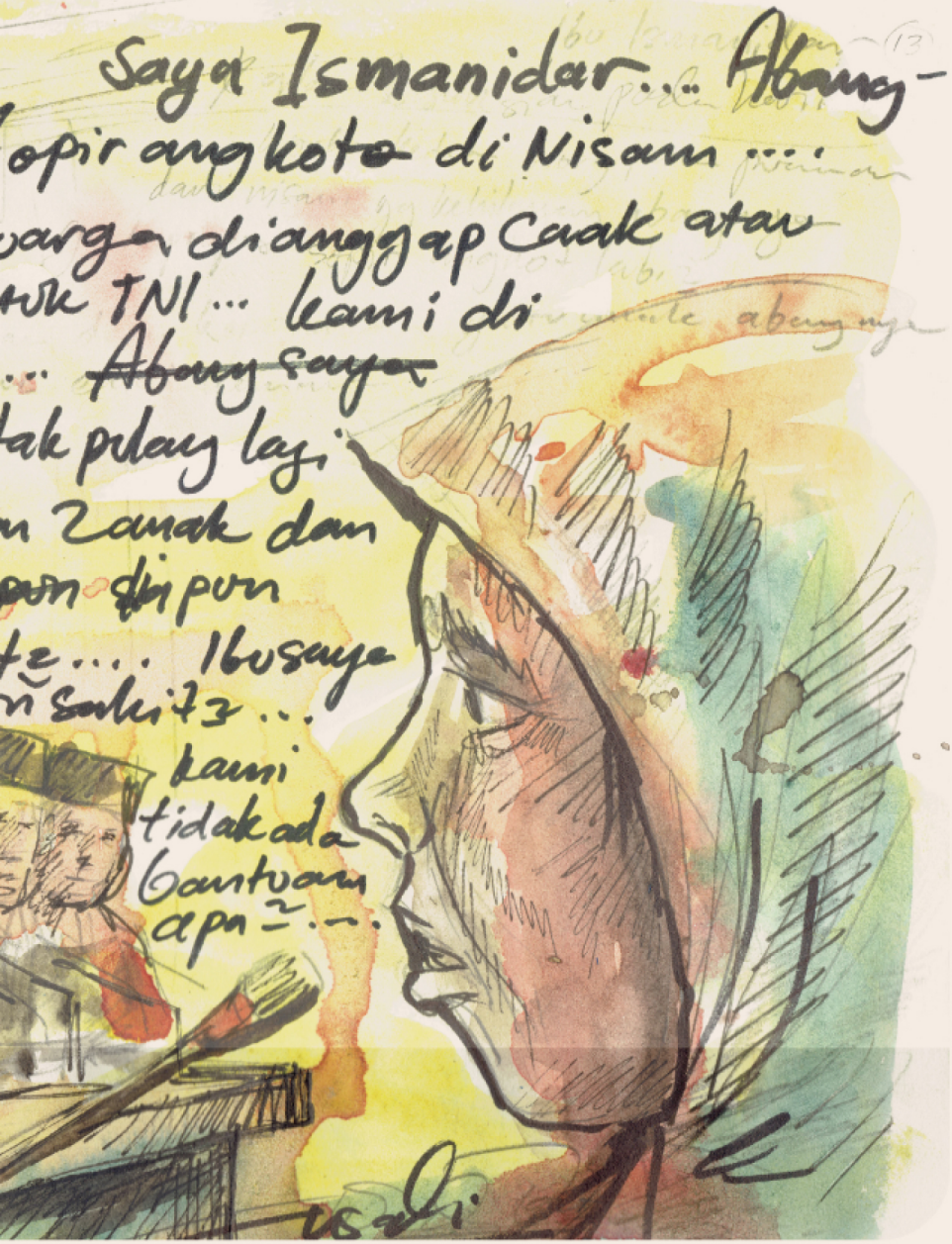
Organisasi kemanusiaan dan saksi sejarah perlu mencari cara agar isu pelanggaran HAM relevan bagi generasi muda terhubung dengan internet. Pekerjaan kita adalah menjalin benang merah cerita pelanggaran HAM agar tersampaikan dengan baik, tanpa harus melibatkan buku tebal.

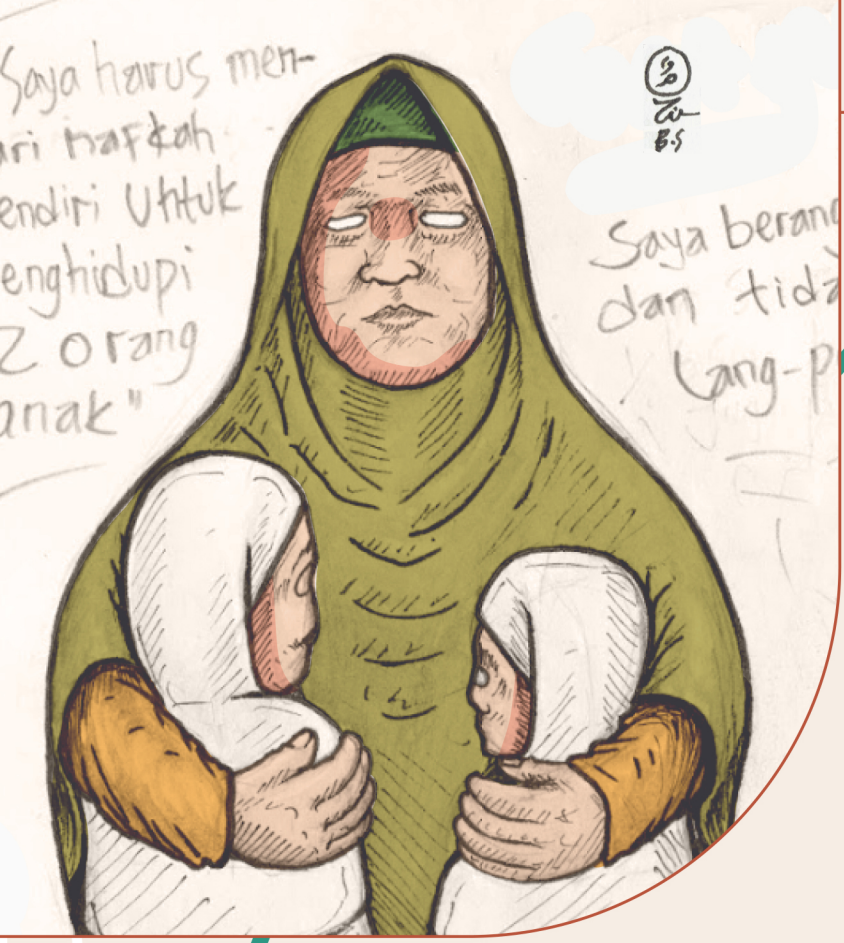
Pendekatan ini memfasilitasi orang muda menemukan makna HAM dan pelanggarannya sendiri, dengan kampanye media yang menarik sebagai support system. Pelibatan orang muda menjadi katalisator perdamaian Aceh, mencegah berulangnya konflik. Perlu terus berbagi pengetahuan tentang sejarah kejahatan, agar tidak berdampak buruk bagi generasi mendatang.

KontraS Aceh bersama AJAR menyadur laporan temuan KKR ACEH 2016-2021 "Peulara Damee", menjadi zine, mengapresiasi dan mempermudah pemahaman tentang keadilan dan perdamaian berkelanjutan.

Azharul Husna
Koordinator KontraS Aceh


Saya
kami sekele
Informan un
koncilkan
Abang Saya
Meninggalk
Istri
Saki


Saya Ismanidar... Abang-
opir angkota di Nisam ....
warga di anggap Cuak atau
uk TNI ... kami di
... Abang saya
tak pelay lagi
n Zuak dan
pun dipun
te .... Ibusaya
n sakit 3 ...
kami
tidak ada
bantuan
apa ? . . .


Saya harus men-
ri nafkah
endiri Untuk
enghidupi
2 orang
anak"
Saya berang
dan tida
Lang-p

Pem-bukaan

Aceh memasuki fase konflik terparah sejak tahun 1976, bertepatan dengan deklarasi Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini lalu direspons tindakan represif pemerintah RI dengan mengerahkan ribuan pasukan tentara dan kepolisian ke Aceh melalui rangkaian operasi militer. Sejak itu, situasi Aceh kian memburuk. Perburuan terhadap pasukan GAM lebih banyak berdampak pada masyarakat sipil. Puluhan ribu warga Aceh jadi korban karena dituduh terkait dengan gerakan tersebut. Pelanggaran HAM berat melanda berbagai wilayah. Selama puluhan tahun, kasus-kasus penculikan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan, penghilangan paksa hingga perampasan harta benda merambah hingga pelosok desa-desa di Aceh.

Derasnya seruan untuk mengakhiri konflik tersebut menemukan momentumnya pada 15 Agustus 2005. Melalui sejumlah babak perundingan, Pemerintah RI dan GAM akhirnya bersedia menandatangani kesepakatan damai (MoU) di Helsinki, Finlandia. Perjanjian damai ini pula yang kemudian melandasi lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

Salah satu poin terpenting dari UUPA yang terkait dengan keadilan transisi di Aceh, yakni pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Pada tahun 2016, atas dorongan kuat sejumlah organisasi dan masyarakat sipil, KKR Aceh dibentuk secara resmi oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Aturan tersebut menjelaskan sejumlah mandat KKR. Pertama, memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu. Kedua, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM, baik individu maupun lembaga dengan korban. Ketiga, merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban

pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

Proses pengungkapan kebenaran dilakukan KKR Aceh, salah satunya, melalui metode pengambilan pernyataan. Sejauh ini, KKR Aceh telah mengambil 5.195 pernyataan korban maupun ahli waris korban pelanggaran HAM masa lalu, yang terdiri dari 3.279 laki-laki dan 1.916 perempuan yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Aceh.

Pada Desember 2023, untuk pertama kalinya, KKR Aceh merilis sebuah laporan temuan bertajuk 'Peulara Damee' (merawat perdamaian) sebagai sajian komprehensif tentang apa yang telah terjadi sepanjang periode konflik bersenjata yang berlangsung di wilayah Aceh.

Ketika menguburkan jenazah Cik M, Suami saya sempat berkata, 'Cik M sudah meninggal, kemungkinan saya tidak lama lagi juga akan satu liang dengan beliau'.

NN44

Kesaksian pembunuhan anggota GAM
Blang Miro, 1991

8



18 tahun. Ibu kesemawe.
ut ayah. 43 thn
thn 2001
Pimpinan Pesantren
darul maarif

Jam 2 mlm ngetuk pintu
nendang pintu. oleh aparat

tutup mata
mobil pantherr
5 org di blkg
umur sekarang 10 thn.

Sampai 2004 mereka
tak cari lagi
2016 Ibu meninggal.
kanker payudara

Ingin spt org
yang punya
masa depan
18 tahun dirinya
tanpa dilihat pemerintah

KKK Ingin Berhenti
300 Rb dpt
dana desyat.


REF
"REFERENDUM
TELAH MERENGG
ANAK SAYA PA
9 NOVEMBER 1999"



UT

DA TANGGAL

LW, 64 Tahun (lunga)



Latar Sejarah

Terjadinya Konflik Di Aceh

Sejak masa perlawanan terhadap Belanda di abad ke-17 masehi, Aceh terus tercatat sebagai wilayah yang dilanda konflik tak berkesudahan. Fase-fase konflik Aceh meliputi: perang melawan kolonial Belanda (1873-1917) hingga proklamasi RI pada tahun 1945, konflik Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau DI/TII (1953-1962), penumpasan komunis (1965-1966), dan terakhir fase konflik Gerakan Aceh Merdeka/GAM (1976-2005).

Peristiwa terakhir konflik GAM-RI merupakan fase konflik dengan skala operasi militer Indonesia paling brutal sepanjang sejarah Aceh. Sejak Gerakan Aceh Merdeka diproklamirkan tahun 1976 oleh Hasan Tiro, Pemerintah Pusat mulai menargetkan penumpasan GAM secara sistematis dengan mengerahkan ribuan tentara dalam **operasi bersandi Jaring Merah, dalam kurun tahun 1990-1998, atau dikenal dengan masa Daerah Operasi Militer (DOM)**. Militer memfokuskan perburuan GAM saat itu di empat sektor wilayah: Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tengah.

Operasi ini berjalan sangat senyap. Masyarakat Aceh tak pernah diberikan informasi memadai soal situasi Aceh serta dampak-dampak yang timbul dari status DOM Aceh ini. **Data-data baru terkuak setelah kejatuhan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto melalui aksi massa di bulan Mei tahun 1998**. Amnesty Internasional merilis berbagai jenis pelanggaran HAM –penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan, penghilangan paksa hingga perampasan harta benda– telah berdampak terhadap 10.000-30.000 jiwa warga Aceh selama operasi itu berlangsung. Sebagian besar korban merupakan warga sipil biasa.

Reformasi turut mempengaruhi situasi Aceh dalam peta nasional. Proses penelusuran fakta soal dampak penerapan DOM silam mulai dilakukan. Menteri Pertahanan Keamanan RI Wiranto saat itu mengakui secara terbuka soal dampak buruk DOM di Aceh. Sementara itu Tim Pencari Fakta kasus kekerasan di Aceh yang dibentuk DPR RI, pada Oktober 1998, merilis laporan

bahwa selama periode DOM telah terjadi ratusan kasus penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum...

Di sisi lain, **keterbukaan politik di era reformasi juga dimanfaatkan oleh GAM untuk mengkonsolidasikan kekuatan pro-kemerdekaan Aceh**. Perlawanan mulai dilancarkan secara terbuka. Ceramah dan pidato berisi aspirasi GAM menggaung di desa-desa dan narasinya beredar secara luas. Dalam situasi tersebut, militer RI justru melancarkan tindakan lebih represif, yang lagi-lagi, lebih banyak menyasar warga sipil. Intensitas kekerasan, teror, pembakaran, penculikan, pembunuhan, serta bentuk kejahatan lainnya terus meningkat. Antara tahun 1999-2002, terjadi pengungsian paksa besar-besaran di Aceh.

Aceh kembali mencekam, tepat saat **Presiden RI Megawati mengumumkan status Darurat Militer pada 19 Mei 2003**, dinihari pukul 00.00 WIB. Sekitar 40.000 lebih pasukan keamanan TNI/Polri diterjunkan ke Aceh, angka terbesar sejak pengerahan militer RI dalam Operasi Seroja di Timor Timur tahun 1975. Kekerasan pecah di seluruh Aceh, korban dari warga sipil terus berjatuhan. Bahkan puluhan aktivis mulai ditangkap dan dihilangkan secara paksa. Kondisi itu juga tak banyak berubah meski setahun berselang, **Presiden Megawati menetapkan status baru di Aceh, Darurat Sipil, pada Mei 2004**. Aceh masih saja tertutup bagi dunia luar. Dinas Penerangan Umum Mabes TNI mencatat sekitar 662 warga sipil tewas dalam rentang penerapan dua masa darurat tersebut.

26 Desember 2004, Aceh diguncang bencana alam gempa bumi dan tsunami. Dalam sekejap, 150.000 hingga 170.000 orang meninggal. Perhatian internasional terhadap Aceh meningkat drastis, situasi Aceh yang porak-poranda dan memerlukan bantuan dari komunitas internasional. Dorongan untuk perundingan damai terhadap pelaku konflik semakin kencang. Hingga akhirnya, kekerasan bersenjata di Aceh secara resmi berakhir melalui **perjanjian damai MoU di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005**.

Setelah kejadian penculikan ayah saya, kami sekeluarga masih dicari-cari juga karena anak korban. Padahal ayah saya bukan GAM.

NN45

Kesaksian pembunuhan dua orang penduduk

1990


Jam 11 malam tanggal 12
ada yang ketok pintu....
Paketan Serba Ribuan


Janvar 2000
Mevelen menalen topuny dar

Tahun, 1990 suami saya melaut dan tidak kembali sejak itu rumah kami selalu didatangi tentara. saya dijemput di malam hari dibawa keliling kampung disuruh cari suami saya. saya dicolek senjata, dibentak ditanyai dimana ditanam senjata. Saya dan anak dikucilkan oleh teman dan keluarga.




mana
i kau sem-
yi kan senjata?
cari dimana !



Kategori Kekerasan

Yang Dialami Oleh Korban Konflik Aceh

Komisi mengidentifikasi 10.652 tindakan kekerasan dalam berbagai periode operasi di Aceh, dengan kategori kekerasan meliputi penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan tidak sah, penghilangan paksa, dan perampasan harta benda, serta menyatakan bahwa jumlah kekerasan seksual mungkin jauh lebih tinggi dari yang tercatat dan terkait erat dengan penyiksaan.

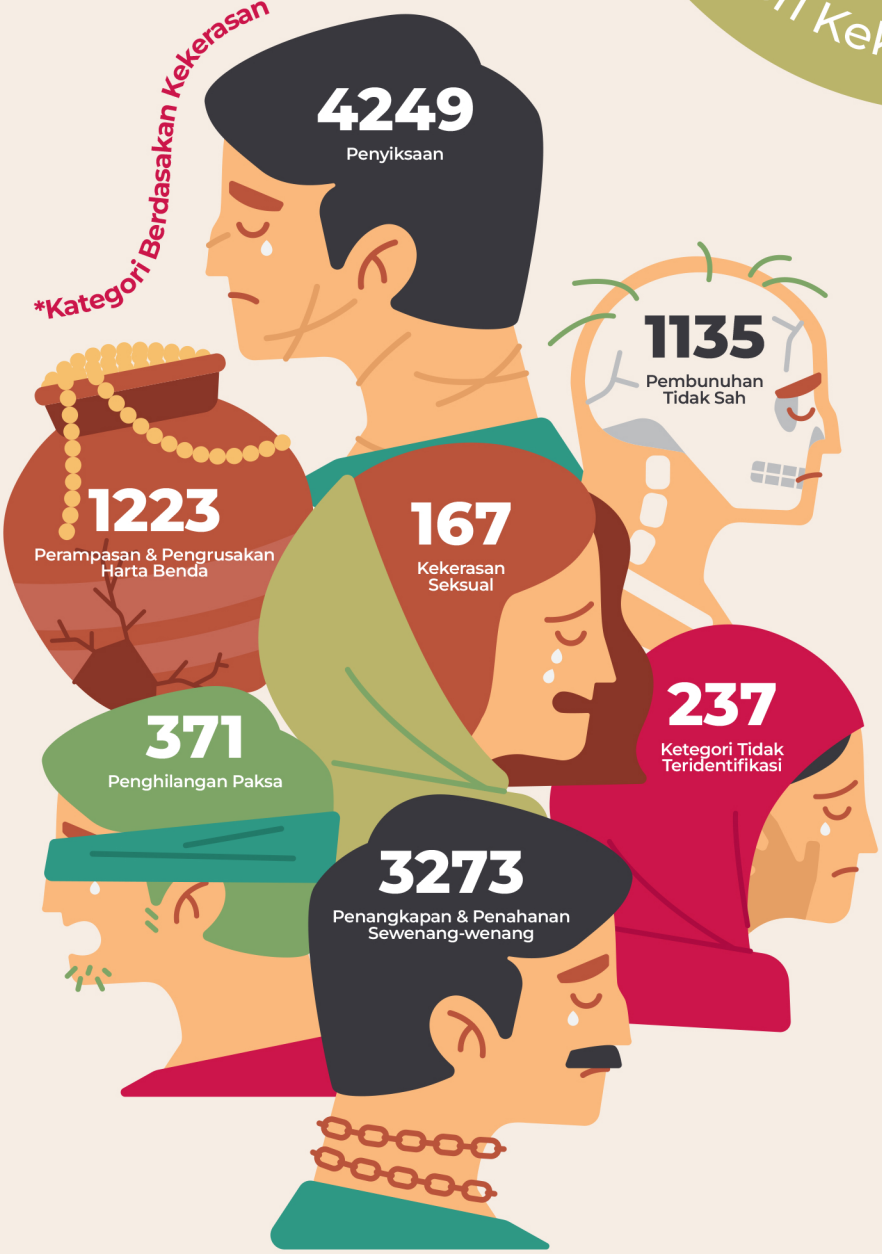
Jumlah Pernyataan	Jumlah Tindak Kekerasan
4765	10652

Tindak Kekerasan Berdasarkan Periode

1797	4364	4496
Periode **Daerah Operasi Militer**	Periode **Operasi Sandi**	Periode **Darurat Militer & Darurat Sipil**
Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer pada tahun 1989 hingga 1998 untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ini berarti wilayah tersebut berada di bawah kontrol militer yang ketat, dengan berbagai operasi militer untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menumpas pemberontakan.	Beberapa operasi militer khusus di Aceh diberi nama sandi untuk menjaga kerahasiaan dan strategi, seperti "Operasi Sadar Rencong" dan "Operasi Cinta Meunasah." Operasi-operasi ini dirancang untuk menangani perlawanan dari GAM dengan tujuan memulihkan keamanan dan stabilitas di Aceh.	Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memberlakukan Darurat Militer di Aceh untuk meredam konflik dengan GAM, yang berubah menjadi Darurat Sipil pada 2004. Selama Darurat Militer, militer mengendalikan situasi keamanan, lalu kendali diserahkan kembali kepada otoritas sipil dengan tetap melibatkan militer.

Kategori Kekeras

*Kategori Berdasakan Kekerasan



Ia kami temukan terikat dengan sejumlah luka bacok parang di tubuhnya, dan bekas tembakan dikepala. Dia masih bernyawa, saya sempat membimbingnya mengucap dua kalimah syahadat.

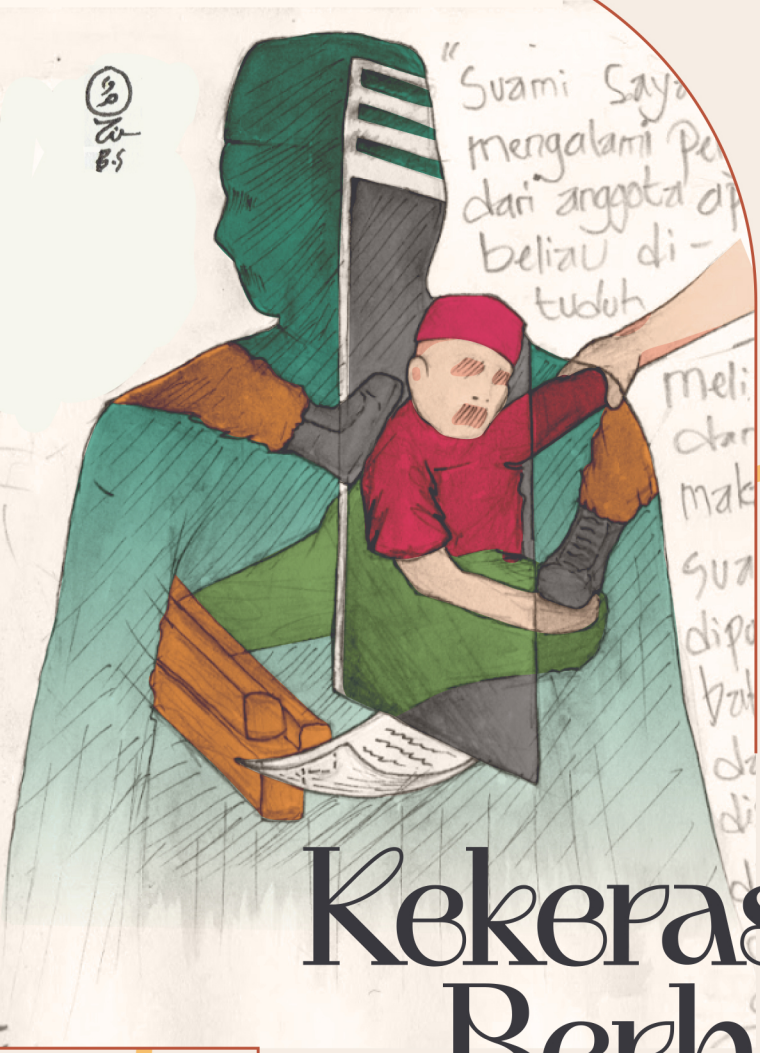
NN47

Kesaksian pembunuhan petani
2001

13 MH(98) Aceh Tamiang.
suami Hilang
tahun 2003
21 Ramadan




4. Dua anak Saya ditebas! 2. di leher dan tangan
1. Suami Saya Hilang
Saat Membawa Hasil Panen ke Kilang Padi
Saya Harus Menggantikan Sepeda Motor Orang yang Hilang di bawa Suami Saya
MBA Pidie



Kekerasan Berbasis Gender

Korban Konflik Aceh

Laporan temuan 'Peulara Damee' yang dirilis Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR Aceh (KKR Aceh) mengungkap secara khusus kasus kekerasan seksual yang terjadi semasa konflik. Kejahatan ini sering terjadi sebagai kelanjutan dari tindak kekerasan penangkapan, penahanan sewenang-wenang, serta penyiksaan.

Berdasarkan perolehan **data hasil pengungkapan kebenaran KKR Aceh, ditemukan 165 korban kekerasan seksual (78 korban perempuan dan 87 laki-laki)**, yang terjadi baik saat penerapan DOM, operasi sandi, maupun di masa pemberlakuan status Darurat Militer dan Darurat Sipil. Angka korban sebenarnya diyakini sangat tinggi, jauh melampaui jumlah korban yang bersedia memberi kesaksian kepada KKR Aceh. Namun penting dipahami bahwa tidak semua korban maupun keluarganya bersedia menceritakan riwayat kekerasan ini, dengan berbagai alasan.

Kejahatan seksual semasa konflik pada faktanya bukanlah tindakan spontan. Pelaku melancarkan kejahatan itu untuk meraup informasi tentang jaringan GAM. Bahkan, kekerasan seksual merupakan strategi diam-diam untuk melemahkan dukungan terhadap GAM yang sangat bergantung pada keluarga-keluarga inti mereka, terutama para ibu, istri, dan anak. **Korban mengalami kekerasan seksual di berbagai lokasi**: pos TNI, pos polisi, rumah tahanan dan lapas, rumah-rumah penduduk, maupun di kawasan terbuka seperti kebun, pinggir sungai, jalan, meunasah, lokasi pengungsian dan lainnya.

Bagi perempuan dan anak perempuan, rumah jadi tempat yang tidak aman ketika konflik terjadi. Ada 22 perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual di rumahnya, rumah tetangga, atau rumah saudaranya. Perempuan dan anak perempuan bukan saja mengalami satu kali kekerasan seksual, tetapi berkali-kali. Bahkan ada yang mengalaminya dalam waktu yang berbeda-beda.

Ratusan korban yang memberi kesaksian kepada KKR Aceh diketahui telah mengalami **berbagai jenis kekerasan, seperti pelecehan seksual, perkosaan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, perkawinan paksa, dan pembunuhan-mutilasi bernuansa seksual**. Sebagian korban mengatakan mereka mengalami kekerasan lebih dari sekali. Terdapat 17 korban kekerasan seksual yang masih berusia anak, yaitu 8 anak perempuan dan 9 anak laki-laki dengan rentang usia 13-18 tahun. Mayoritas anak ini mengalami kekerasan seksual saat masih duduk di bangku sekolah.

Pelaku umumnya melakukan pelecehan seksual kepada korban perempuan dengan alasan ingin memeriksa tato atau ingin melihat ada/tidaknya bekas korban telah melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, pelaku mengintimidasi, memaksa, dan menginvasi tubuh/organ seksual korban. **Motif pembenaran pelaku kekerasan seksual adalah tuduhan bahwa korban memiliki hubungan dengan GAM**. Data yang ada mengungkapkan 21 perempuan yang disiksa militer karena berstatus istri GAM. Tiga perempuan di antaranya bahkan tetap menjadi korban kekerasan seksual meski suaminya yang anggota GAM sudah meninggal.

Dari sini, sangat jelas bahwa mayoritas korban merupakan orang yang tidak pernah bersalah, dan tidak terkait dengan gerakan separatisme. Mereka telah dituduh tanpa dasar dan dihukum secara kejam, tidak manusiawi, dan direndahkan martabatnya. Tuduhan itu, meski tidak berdasar, namun bisa dibenarkan ketika disertai ancaman, seperti menggunakan senjata api. Apalagi saat jumlah pelakunya lebih banyak daripada korban yang seorang diri.

Setibanya di gunung, dua pihak terlibat kontak senjata. Masyarakat berlarian mencari keselamatan masing-masing, suami saya tertembak dan tewas ditempat. Saya tidak tahu siapa yang menembaknya, tentara atau GAM.

NN46

Kesaksian pembunuhan warga sipil
Pulo Kenari, 1998



Suami saya lahir di Aceh Besar 1958.
a bergabung dalam GAM dan bekerja
ebagai pedagan dan petani.-

Dini hari 2002 ia digotong oleh Sekt
mpok Aparat yang membawa Senjata
an pisau. Suami saya sedang tidur dengan
idak menggunakan pakaian hanya celana
dalam, ia di bawa ~~dek~~ sambil mulutnya
ditutupi baju kotor.-

Tidak ada saksi karena larut malam
dan masyarakat pun takut keluar.

Sekarang saya berjualan buah untuk
menafkahi 5 orang anak.-



Efek & Dampak

Yang Dialami Oleh Korban Konflik Aceh

Para korban konflik tentu saja meninggalkan efek dan dampak akibat dari konflik panjang yang dialami oleh mereka hingga hari ini. Dampak korban konflik dikemas menjadi tiga bagian, yaitu dampak secara mental, dampak secara fisik, dan dampak secara ekonomi. Adapula tempat lokasi kejadian serta target kekerasan yang diterima korban, dan pihak-pihak yang menjadi pelaku kekerasan.

Dampak Mental

- **Trauma Psikologis**

  Penyiksaan dan Penangkapan Sewenang-wenang: Korban mengalami trauma mendalam akibat penangkapan, penahanan, dan penyiksaan. Ini termasuk gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, dan kecemasan.

- **Kekerasan Seksual**

  Walaupun jumlah kasus yang teridentifikasi relatif kecil, namun jumlah kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan sangat mungkin lebih tinggi dari angka yang disebutkan. Korban kekerasan seksual sering menghadapi stigma, rasa malu, dan gangguan mental yang parah.

Dampak Fisik

- **Cedera Akibat Penyiksaan**

  Dari 4.249 tindakan penyiksaan yang dilaporkan, korban menderita berbagai bentuk cedera fisik, mulai dari luka ringan hingga cacat permanen. Penyiksaan ini sering dilakukan dengan brutal dan meninggalkan dampak fisik jangka panjang.

- **Pembunuhan dan Penghilangan Paksa**

  Sebanyak 1.135 kasus pembunuhan dan 371 kasus penghilangan paksa dilaporkan, menunjukkan tingkat kekerasan yang ekstrim yang sering kali berakibat fatal. Keluarga korban juga mengalami penderitaan

mental akibat kehilangan orang yang dicintai tanpa kepastian nasib mereka.

- **Kekerasan Seksual**

  Selain trauma mental, kekerasan seksual juga menyebabkan kerusakan fisik pada korban, yang membutuhkan perawatan medis dan rehabilitasi.

Dampak Ekonomi

- **Kerusakan dan Perampasan Harta Benda**

  Sebanyak 1.223 tindakan perampasan dan perusakan harta benda mempengaruhi stabilitas ekonomi korban. Kehilangan rumah, properti, dan sumber mata pencaharian menyebabkan kemiskinan dan ketergantungan ekonomi.

- **Gangguan Aktivitas Ekonomi**

  Kekerasan yang terjadi di rumah, tempat kerja, dan fasilitas umum mengganggu kehidupan ekonomi sehari-hari. Banyak korban tidak dapat kembali bekerja atau beraktivitas secara normal, yang berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka.

Lokasi Kejadian dan Target Kekerasan

- **Tempat Terjadinya Kekerasan**

  Kejadian kekerasan paling banyak terjadi di rumah korban, pos militer, tempat kerja, dan kantor polisi. Ini menunjukkan bahwa kekerasan menyebar luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban.

- **Target Kekerasan**

  Korban bukan orang acak, melainkan mereka yang dianggap sebagai ancaman atau target oleh kedua belah pihak yang bertikai, termasuk keluarga tokoh GAM, simpatisan, jurnalis, dan pekerja kemanusiaan.

Pelaku Kekerasan

- **Aparat Keamanan Indonesia**

  Mayoritas kekerasan (96 persen) dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, termasuk TNI, Polri, dan satuan rahasia lainnya.

- **Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM)**

  Sebagian kecil kekerasan dilakukan oleh anggota GAM, terutama terhadap mereka yang dianggap sebagai mata-mata atau tidak mendukung perjuangan mereka.

Di sana saya melihat mereka sudah tertidur dalam kobaran api yang membakar pondok, dan disana ada anak saya.

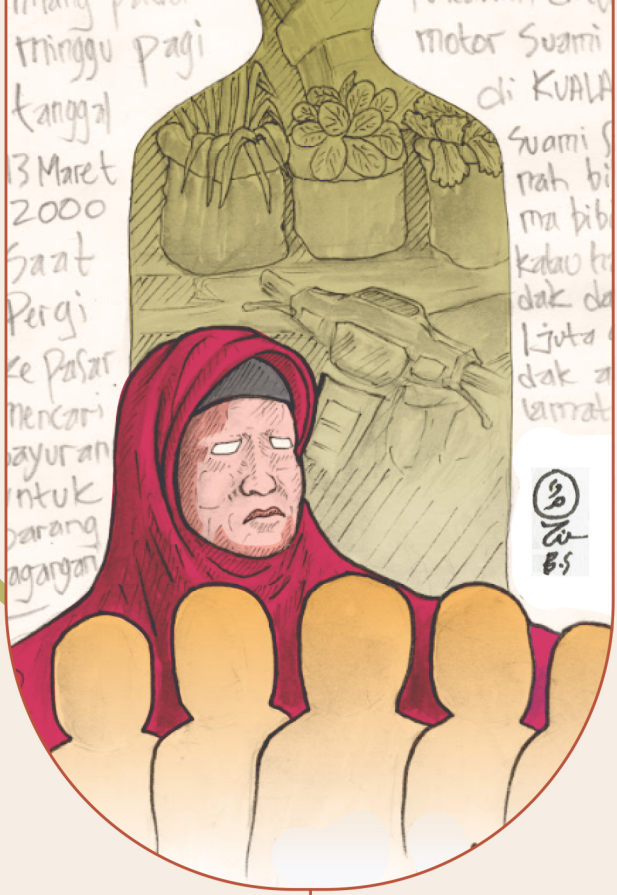
NN48

Kesaksian pembunuhan S
Kuala Lancok, 1990


(10) IBU (65) Inoksemawe pendidikan terakhi
Ayah saya hilang tanggal
Ada yang lihat ayah
di yang Hope; depan
Mung
Anggot
TNI

ir. D3. Ibu Rumah tangga.
3 Mei 2003. Sekitar jam 17.00 sore.
Saya dimasukkan dalam mobil taft
impang Selat malaka.
kan beliau di culik karena abang saya
a GAM waktu itu.





Mandat & Rekomendasi

Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Aceh

Dalam melakukan kerja-kerja perdamaian KKR Aceh dibentuk untuk mengungkap kebenaran terkait pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh pada masa konflik. Adapula mandat dan rekomendasi yang diinisasikan oleh KKR Aceh guna mendorong kinerja KKR Aceh.

Mandat

Perubahan Hukum dan Reformasi Institusi

- **Pengawasan DPR RI**

  DPR RI mengkaji laporan KKR Aceh, mengawasi sektor keamanan (TNI, Polri, intelijen), dan memastikan langkah untuk menjaga perdamaian dan menghukum penyalahgunaan wewenang.

- **Pengakuan dan Reformasi**

  Pemerintah mengakui pelanggaran HAM di Aceh, membentuk tim reformasi keamanan untuk memastikan akuntabilitas dan pencegahan pelanggaran HAM di masa depan.

- **UU Penyiksaan dan OPCAT**

  DPR RI dan Pemerintah mengesahkan UU Penyiksaan, meratifikasi OPCAT, dan mengkaji efektivitas peraturan anti-penyiksaan.

- **Reformasi Peradilan Militer**

  Reformasi peradilan militer untuk mengadili pelanggaran HAM oleh militer di pengadilan sipil.

Rekomendasi

Perubahan Hukum dan Reformasi Institusi

- **Pengawasan DPR RI**

  DPR RI mengkaji laporan KKR Aceh, mengawasi sektor keamanan (TNI, Polri, intelijen), dan memastikan langkah untuk menjaga perdamaian dan menghukum penyalahgunaan wewenang.

- **Pengakuan dan Reformasi**

  Pemerintah mengakui pelanggaran HAM di Aceh, membentuk tim reformasi keamanan untuk memastikan akuntabilitas dan pencegahan pelanggaran HAM di masa depan.

- **UU Penyiksaan dan OPCAT**

  DPR RI dan Pemerintah mengesahkan UU Penyiksaan, meratifikasi OPCAT, dan mengkaji efektivitas peraturan anti-penyiksaan.

-

  Reformasi peradilan militer untuk mengadili pelanggaran HAM oleh militer di pengadilan sipil.

- **Pelatihan HAM**

  Pemerintah meningkatkan pemahaman HAM dan kearifan lokal Aceh bagi aktor keamanan.

- **Ratifikasi Konvensi**

  Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa dan Statuta Roma, serta revitalisasi Pengadilan HAM.

- **Ratifikasi Konvensi Pengungsi**

  Implementasi ratifikasi konvensi pengungsi oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.

- **Uji Publik Pimpinan Keamanan**

  Uji publik rekam jejak calon Kapolda dan Kejati dengan persetujuan Gubernur Aceh.

- **Uji Publik Pangdam**

  Uji publik rekam jejak calon Pangdam Iskandar Muda dengan persetujuan Gubernur Aceh dan DPR Aceh.

- **Penugasan Aparat**

  Menghindari penugasan aparat yang pernah bertugas di Aceh selama konflik untuk mengurangi dampak traumatis.

Kebijakan Politik

- **Kebijakan HAM dan Kearifan Lokal**

  DPR RI, Pemerintah, DPR Aceh, dan Pemerintah Aceh menyusun kebijakan yang menghormati HAM dan kearifan lokal Aceh dengan melibatkan masyarakat sipil.

- **Pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan Seksual**

  DPR RI dan Pemerintah memastikan pelaksanaan UU ini untuk mencegah terulangnya kekerasan di Aceh.

- **Penanganan Korban HAM**

  Wali Nanggroe memastikan penanganan korban pelanggaran HAM masa lalu sesuai kekhususan Aceh.

- **Perencanaan Pembangunan Berperspektif HAM**

  Bappenas dan Bappeda memastikan perencanaan pembangunan berperspektif HAM dengan mengintegrasikan hak-hak korban dalam program pembangunan.

- **Pendekatan Pembangunan dalam RPJM**

  Pemerintah Aceh merencanakan kebijakan berdasarkan rekomendasi KKR dengan pendekatan pembangunan berperspektif HAM dalam RPJM.

- **Pemberdayaan Perempuan Korban**

  Program untuk memperkuat akses perempuan korban terhadap keadilan, kegiatan sosial-ekonomi, dan bantuan hukum.

- **Pembentukan Komisi Klaim**

  Pemerintah RI dan Aceh membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim dan reparasi korban HAM.

Kebijakan Administratif

- **Pelayanan Publik Berbasis HAM**

  Pemerintah memastikan pelayanan publik yang menghormati HAM bagi korban konflik.

- **Skema Pelayanan Publik**

  DPR RI dan DPR Aceh menyusun skema pelayanan publik yang mengutamakan perlindungan HAM.

- **Peran Ombudsman**

  Ombudsman RI memaksimalkan perannya untuk memastikan pelayanan publik yang menghormati HAM.

- **Penguatan KKR Aceh**

  DPR RI dan DPD RI memperkuat kelembagaan KKR Aceh di level nasional.

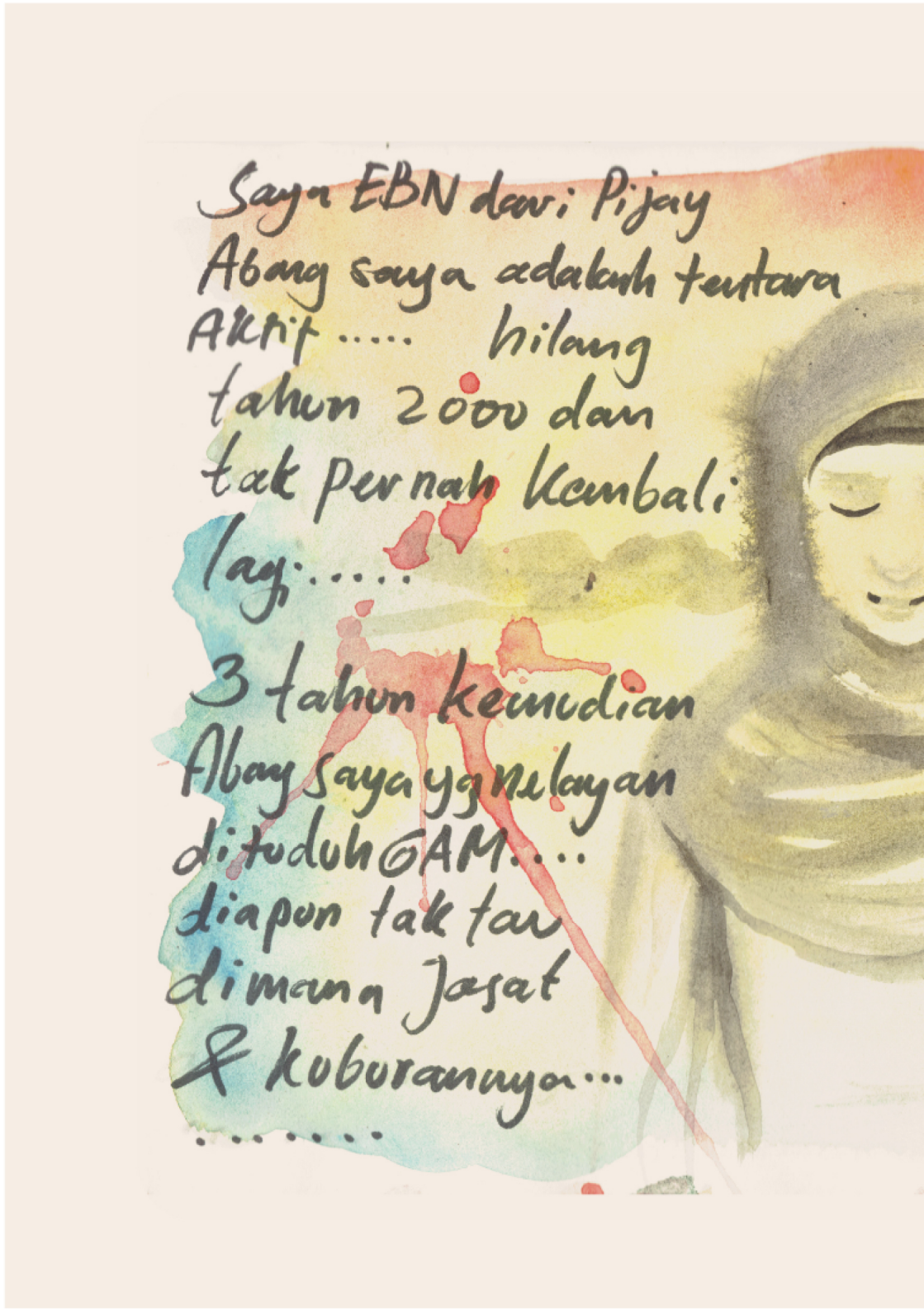
Saat itu korban sudah berjatuhan di halaman meunasah. Ketika aparat TNI melihat suami saya, mereka langsung mengejar dan menembakinya. Suami saya pun meninggal di tempat.

NN49

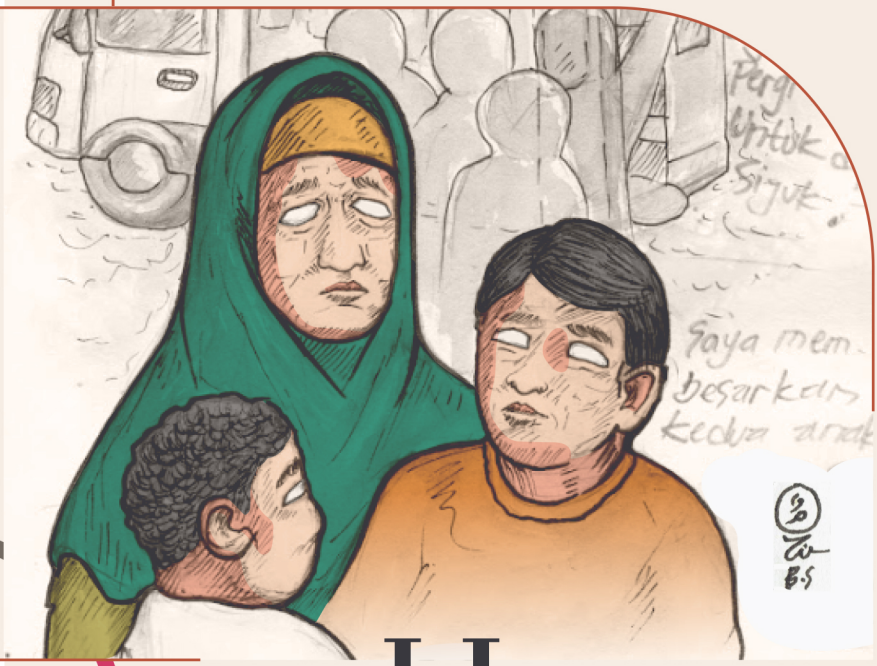
Kesaksian eksekusi kilat 11 penduduk Lhok Meulaboh
2002


sudah menikah
DIBAWA
OTK!!!


DIJEMPUT PAKSA //
DIBAWAH TODONGAN
SENJATA
DISURUH
TIARAP!!
SAMPAI SEKARANG
SAYA TAK TAU
DIMANA KUBURNYA.


Saya EBN dari Pijay
Abang saya adalah tentara
Aktif ..... hilang
tahun 2000 dan
tak pernah kembali
lagi .....
3 tahun kemudian
Abang saya yg hilang
dituduh GAM....
diapun tak tau
dimana jasat
& kuburannya...
.....





Harapan Generasi Muda

Untuk Masa Depan Aceh


Pertahankan
Hak Rakyat
Aceh
Hukum
Yang
Dirupiahkan!
Sejarah
bukan untuk
diulang
Terjebak
Miskin
Di Negeri Yang
Kaya
Sejarah Dijadikan
Pelajaran
Bukan Sekedar
Tontonan
Semoga
Aceh
Damai
Meski Teduh
Tetap Saja
Luruh
Inikah Damai?
Menapaki Alur
Yang Tak Mungkin
Mundur
Merawat
Memori Kolektif
Melalui Ruang Digital
echoesofjustice.com

Aceh TRC

DAMAI ACEH

Sebuah
Kotak
Pandora

AJAR

KontraS Aceh
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Aceh
The Aceh Commission for Disappearances and Victims of Violence

Kebenaran • Keadilan • Reparasi • Reformasi

Memori Keadilan

Temuan KKR Aceh

Aceh TRC

DAMAI ACEH

Sebuah **Kotak Pandora**

AJAR

KontraS Aceh

Asia Justice And Rights × KontraS Aceh